

# PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI FONDASI PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA BERKEMAJUAN

Sa'diyah<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

*The existence of Islamic religion education in Indonesia from the early period has raised dilemmatic discussion, it appears many political policies on the existence of religion education. This present article shows the universality of Islamic-character concepts in preparing a generation to face global concepts. Through education, Islamic concepts can be internalized in students' mind. The processes will, hopefully, have resulted not only firm understanding but also resourceful actions in daily activities. When it has achieved, the students can make contribution to personal, social, and national development.*

**Key words:** Islamic religion education, character, development

## **ABSTRAK**

*Kehadiran Pendidikan Agama Islam di Indonesia memancing banyak diskusi, hal ini dibuktikan dengan munculnya banyak kebijakan politik terkait masalah tersebut. Artikel ini menunjukkan universalitas yang terkandung dalam konsep karakter Islam. Karakter tersebut dapat berkontribusi dalam menyiapkan sebuah generasi untuk menghadapi tantangan global. Melalui pendidikan, konsep agama Islam dapat diinternasionalisasikan dalam pikiran siswa. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan, tidak hanya pemahaman, perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tujuan tersebut dapat diraih, siswa dapat berkontribusi pada kemajuan diri, lingkungan, dan bangsanya.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Agama Islam, karakter, kemajuan

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

## PENDAHULUAN

Sulit untuk menafikan peran strategis pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Kehidupan yang berkualitas (dalam bingkai intelektual, sosial, kebudayaan, dan ekonomi) berpangkal dari pendidikan yang juga berkualitas. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan juga berperan dalam memunculkan embrio pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Saat itu, pendidikan mampu memantik nalar kaum-kaum terpelajar untuk mengakhiri segala jenis penjajahan. Pendidikan yang didapat oleh para kaum terpelajar diejawantahkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi dalam tujuan yang tunggal; kemerdekaan. Diplomasi, konfrontasi, dan kegiatan sosial (pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan lain-lain) adalah kontribusi dari para pendahulu bangsa ini yang ‘tercerahkan’ oleh proses pendidikan. Perjuangan semacam itulah yang nyatanya mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Freire mengatakan bahwa “*to surmount the situation of oppression, people must first critically recognize its causes, so that through transforming action they can create a new situation, one which makes possible the pursuit of a fuller humanity*”<sup>2</sup>. Pernyataan Freire tersebut seolah menjelaskan struktur strategi pergerakan nasional terdahulu. Cita-cita lepas dari situasi penjajahan harus diawali dari kemampuan untuk *critically recognize its causes* (memahami -dengan kritis- penyebab penjajahan). Pemahaman kritis harus diawali dari cara berpikir yang kritis. Berpikir kritis atau *critical thinking* didefinisikan sebagai sebuah tingkat pemahaman membaca atau kemampuan berdiskusi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mempertanyakan dan mengevaluasi apa yang dibaca atau didengar<sup>3</sup>. Para pendahulu bangsa ini membaca dengan kritis apa yang terjadi pada bangsa ini selama berabad-abad. Hasil pembacaan kritis tersebut kemudian dibawa pada ranah perjuangan yang lebih nyata. Wahana utama untuk menumbuhkan kemampuan mempertanyakan dan mengevaluasi keadaan tersebut adalah pendidikan.

Bersandar pada pengalaman sejarah tersebut, pendidikan tidak selayaknya hanya dilihat dari hilir perjuangan kemerdekaan bangsa. Pendidikan justru berada di hulu perjuangan kemerdekaan bangsa. Melalui pendidikan, tokoh-tokoh bangsa diberi dan menemukan visi, dibina dan membina integritas, hingga menyusun konsep-konsep pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, pendidikan harus selalu ditempatkan sebagai sistem yang paling efektif untuk menelurkan generasi yang berkualitas.

---

<sup>2</sup> Freire, P, *Pedagogy of the Oppressed*, (New York: Continuum, 1970), hlm. 47

<sup>3</sup> Richards, J. C. dan Richard, S, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (London: Longman, 2002), hlm. 135

Frasa ‘generasi yang berkualitas’ tidak boleh hanya dipandang secara ekonomis-kapitalistis. Tidak tepat jika kualitas sebuah generasi hanya diukur menggunakan standar-standar kuantitatif. Terlalu prematur jika kualitas sebuah generasi hanya dilihat dari berapa jumlah sarjana, magister, dan doktor. Terlalu rapuh juga jika kualitas sebuah generasi hanya dilihat dari jumlah masyarakat usia produktif yang terserap oleh lapangan kerja.

Kualitas sebuah generasi tidak dapat diukur menggunakan skema *quality control* dalam industri. Sebuah produk industri harus melalui beberapa proses untuk dinyatakan layak guna atau layak konsumsi. Skema produksi dalam industri hanya mementingkan unsur kualitas fisik dari sebuah entitas. Manusia tidak dapat hanya diukur dari kacamata layak guna atau layak konsumsi dalam dunia kapitalis. Sebagai makhluk yang dinamis, manusia akan selalu mengalami perubahan-perubahan sepanjang hidupnya. Perubahan tersebut mencakup dimensi fisik dan psikis. Sebagai contoh, secara fisik, seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi, menduduki jabatan yang tinggi, dan memiliki status sosial yang tinggi. Ini dimensi fisik. Dalam kacamata kapitalistis-ekonomis, seseorang dengan pencapaian tersebut jelas dikelompokkan sebagai manusia yang berkualitas. Namun, ketika perubahan psikis terjadi dan bermuara pada tindakan melanggar hukum (baca: korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain), ukuran kualitas kapitalistis-ekonomis ternyata tidak benar-benar mengukur kualitas seorang manusia atau sebuah generasi.

Pendidikan seharusnya tidak semata mengurus dimensi fisik manusia. Pendidikan jangan diperlakukan sebagai industri yang menghasilkan manusia dengan kualifikasi SD/SMP/SMA/Universitas. Pendidikan seharusnya mampu menyentuh sisi psikis manusia sehingga penguasaan ilmu dapat dibarengi dengan keutuhan karakter. Karakter yang diharapkan tentu saja karakter manusia yang baik. Dalam konteks Indonesia, karakter yang diharapkan dapat dipersempit menjadi karakter yang berorientasi pada kemajuan bangsa secara paripurna. Masa perjuangan kemerdekaan telah berakhir, tetapi mempertahankan kemerdekaan tidak boleh berakhir. “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ...” (penggalan pembukaan UUD 1945) adalah gambaran karakter manusia yang patut direnungkan. Para pendahulu bangsa ini (kalangan akademikus, militer, politikus, dan rakyat jelata) telah menunjukkan bahwa keberhasilan dari sebuah proses tidak melulu berasal dari usaha pribadi, tetapi ada kekuasaan dan rahmat Allah SWT yang berperan. Kesadaran akan kekuasaan dan rahmat Allah SWT adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap generasi agar kehidupan bangsa tidak hanya sekadar menjadi bangunan fisik yang kuat tetapi juga menjadi bangunan fisik dan psikis yang kuat. Misalnya, ketika seseorang memiliki jabatan tinggi, maka dia tidak akan berani menyalahgunakan kekuasaanya karena

posisinya hari ini adalah ‘rahmat Allah SWT’ dan Allah SWT memiliki kekuasaan untuk mengambil jabatannya. Karakter tersebut dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Secara spesifik, Pendidikan Agama Islam dapat menjadi instrumen utama dalam penanaman karakter tersebut pada generasi hari ini. Pendidikan Agama Islam dapat membentuk dimensi fisik dan psikis manusia secara simultan.

Tulisan ini, secara kronologis, akan membahas dinamika, konsep, dan (rencana) implementasi Pendidikan Agama Islam dalam fungsinya sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa. Eksplorasi mengenai hal-hal tersebut akan ditelaah secara menyeluruh sehingga posisi dan signifikansi Pendidikan Agama Islam untuk membentuk karakter bangsa dalam sistem pendidikan Indonesia dapat tergambar secara komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Agama Islam dari Masa ke Masa**

Diskusi mengenai fungsi Pendidikan Agama Islam sepertinya harus diawali dari perkembangan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Indonesia secara kronologis. Beberapa pakar kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia membagi periode perkembangan Pendidikan Agama Islam ke dalam periode penjajahan dan periode kemerdekaan<sup>4</sup>. Sebagai sebuah sistem, kondisi pendidikan sangat terpengaruh oleh konstelasi politik yang berlangsung. Pendidikan Agama Islam juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh sebuah rezim pada suatu zaman.

#### **- Pendidikan Agama Islam Masa Kolonial Belanda**

Pada masa kolonial, segala jenis kebijakan harus selalu berorientasi pada pelestarian kolonialisme. Oleh sebab itu, kebijakan mengenai Pendidikan Agama Islam juga dibuat untuk mendukung berbagai kepentingan penjajah. Di sisi lain, Pendidikan Islam sesungguhnya telah ada beriringan dengan proses awal penyebaran Islam di Indonesia. Sistem pendidikan formal, saat itu, belum terbentuk. Konsep-konsep Islam disampaikan semata melalui perkataan dan perbuatan<sup>5</sup>.

Penjajahan yang dimulai oleh bangsa Portugis, diikuti oleh bangsa Inggris, dan kemudian oleh bangsa Belanda membuat masyarakat dihadapkan pada kondisi sosial politik

---

<sup>4</sup> Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara kerjasama dengan Ditjen Bimbingan Islam Depag RI, 2000), hlm. 146-152

<sup>5</sup> Yunus, M, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hlm. 12-14

yang karut marut. Penjajahan yang berkepanjangan menyebabkan sistem pendidikan sama sekali tidak terbangun. Segala sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia hanya diarahkan pada kepentingan-kepentingan strategis penjajah. Hal ini menyebabkan pendidikan rakyat secara umum sangat terbelakang.

Perlu dipahami bahwa penguasaan kolonialisme Belanda tidak hanya mencakup eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga intervensi politik dan kehidupan beragama. Sebagaimana bangsa Portugis, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda juga membawa misi penyebaran agama Kristen (*Gospel*) melalui pendidikan. Nilai-nilai Islam yang sudah mengakar pada kehidupan rakyat tentu saja tidak sejalan dengan misi kolonialisme yang dibawa oleh Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk membatasi perkembangan Pendidikan Agama Islam secara ketat. Salah satu produk kebijakan tersebut adalah peraturan tentang netral agama<sup>6</sup>. Peraturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memisahkan dan menjauhkan ajaran agama Islam dari sistem pendidikan di sekolah.

Kebijakan-kebijakan kolonial Belanda sangat menekan pendidikan secara umum, khususnya pendidikan Islam. Kebijakan tersebut dibuat untuk mematikan militansi kaum muslim terpelajar sehingga kepentingan kolonialisme di Indonesia tetap terjaga. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap pola pengembangan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dipersepsikan lebih rendah dari sekolah bentukan pihak Belanda, sedangkan lembaga pendidikan yang membawa misi kristenisasi didukung sepenuhnya oleh pemerintah Belanda.

Salah satu kebijakan diskriminatif tersebut adalah kebijakan yang dibuat oleh Van den Boss. Ketika dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta, Van den Boss mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap bahkan diperlakukan sebagai sekolah pemerintah, departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di setiap karesidenan didirikan satu sekolah kristen.<sup>7</sup>

Selain itu, liciknya strategi kolonialisasi pendidikan Belanda dapat ditemukan dalam kebijakan Van Der Cappelen. Dalam tulisan Steenbrink disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Cappelen ada perintah untuk mengadakan penelitian mengenai sistem pendidikan masyarakat Jawa sebagai bahan untuk perencanaan berdirinya sekolah dasar bagi pribumi. Melalui surat edaran tersebut juga dimunculkan perintah bagi para bupati untuk mengeluarkan peraturan terkait penjaminan pemerataan

---

<sup>6</sup> Zuhairini, Op.Cit, hlm. 150

<sup>7</sup> Said, M. dan Juniar, A, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Penerbit Jemmars, 1987), hlm. 46

kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis yang diharapkan oleh pemerintah Belanda sama sekali tidak bertujuan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi semata agar rakyat lebih mudah memahami undang-undang dan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial<sup>8</sup>.

Puncak dari segala kebijakan diskriminatif Belanda adalah pemebntukan *Presterraden* pada tahun 1882. *Presterraden* adalah sebuah badan yang bertugas untuk mengawasi kehidupan agama dan pendidikan Islam. Badan tersebut mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang akan memberikan pengajaran agama harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah kolonial. Kebijakan inilah yang kemudian dikenal dengan Ordonansi Guru<sup>9</sup>.

Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi sesungguhnya hanyalah upaya untuk menafikan praktik pendidikan Islam yang sudah berlangsung sejak dulu bahkan organisasinya sudah teratur pada masa kerajaan Mataram<sup>10</sup>. Pendidikan Islam dianggap tidak memberikan dampak positif bagi pelestarian kolonialisme, justru menjadi ancaman bagi eksistensi pemerintah kolonial.

#### - **Pendidikan Agama Islam Masa Penjajahan Jepang**

Terusirnya Belanda dari Indonesia pada 1942 membuka babak penjajahan baru yang dialami rakyat. Propaganda Jepang berupa *Hakko Ichiu* atau kemakmuran bersama di Asia Timur Raya merupakan kamufase untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Setelah simpati didapat, kekejaman secara militer, sosial, dan politik tidak segan dilakukan oleh pihak Jepang.

Pada masa ini, Jepang benar-benar menebar jaring siasat pada kehidupan agama di Indonesia. Taktik dan siasat Jepang tentu saja dilakukan untuk menopang segala kepentingan kolonial Jepang. Beberapa siasat yang dilakukan Jepang antara lain; kepemimpinan kantor urusan agama diserahkan kepada umat Islam (pada masa Belanda dipimpin oleh orientalis), pondok-pondok pesantren diberikan bantuan, sekolah-sekolah

---

<sup>8</sup> Steenbrink, K.A, *Pesantren Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 63

<sup>9</sup> Maksun, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 115

<sup>10</sup> Yunus. M, *Op.Cit.*, hlm. 227-229

negeri diberi pelajaran budi pekerti dengan konten yang serupa dengan pelajaran agama, dan pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta<sup>11</sup>.

Meskipun berupa siasat, kebijakan pemerintah Jepang tersebut merupakan kemajuan bagi pola Pendidikan Agama Islam di sekolah. Para siswa yang beragama Islam dapat memperoleh pelajaran agama secara lebih terstruktur, meskipun Pendidikan Agama Islam tetap tidak diperkenankan menjadi mata pelajaran di sekolah pemerintah.

Di akhir masa pendudukan Jepang, para tokoh pergerakan (melalui panitia persiapan kemerdekaan) berhasil menyusun rumusan mengenai tujuan pendidikan. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

“Dalam garis-garis adab perikemanusiaan, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat”<sup>12</sup>

Dari rumusan tersebut, pendidikan agama dianggap sebagai landasan bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional. Hal ini tentu saja menjadi landasan yuridis yang sangat monumental bagi kedudukan dan perkembangan Pendidikan Agama Islam pada masa pasca-kolonial.

#### - **Pendidikan Agama Islam Masa Revolusi**

Pembuatan ‘Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran’ pada hari-hari terakhir pendudukan Jepang menjadi landasan dalam strategi pengembangan Pendidikan Agama Islam. Setelah kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama (Ki Hajar Dewantara) segera mengeluarkan instruksi umum berupa SK Menteri PP & K. Instruksi tersebut berisi perintah kepada seluruh Kepala Sekolah dan guru-guru untuk (1) mengibarkan bendera merah putih setiap hari di halaman sekolah (2) melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya (3) menurunkan bendera Jepang dan menghapus Kamigayo (4)

---

<sup>11</sup> Zuhairini, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 152

<sup>12</sup> Djumhur, I. Dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Penerbit CV. Ilmu, 1976), hlm. 199

menghapus bahasa Jepang dan segala jenis upacara yang berasal dari tentara Jepang, dan (5) memberikan semangat kebangsaan kepada murid<sup>13</sup>.

Pada masa tersebut, upaya pemasukan Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah umum akhirnya menemui momentumnya. Diawali usul dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), pada tanggal 29 Desember 1945, menteri PP & K membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Hasil yang dicapai oleh panitia tersebut adalah rumusan sistem pendidikan dan kurikulum SMP. Sistem SMP, yang awalnya melanjutkan sistem Jepang, diubah menjadi 3 tahun dan dimunculkannya dua konsentrasi bagi kelas III (bagian A – bahasa dan pengetahuan sosial; bagian B – ilmu pasti dan ilmu alam). Pada sistem ini, untuk pertama kalinya, Pendidikan Agama Islam juga dimasukkan dalam kurikulum SMP. Berikut adalah tabel kurikulum yang dibuat:

Tabel 1

Kurikulum SMP tahun 1946<sup>14</sup>

No	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran dalam Seminggu			
		I	II	IIIA	IIIB
1	Bahasa Indonesia	6	6	6	5
2	Bahasa Daerah	2	2	3	2
3	Bahasa Inggris	3	3	4	3
4	Berhitung/Aljabar	4	4	2	4
5	Ilmu Ukur	3	3	-	3
6	Ilmu Alam/Kimia	2	2	2	2
7	Ilmu Hayat	2	2	2	2
8	Ilmu Bumi	2	2	3	2

<sup>13</sup> Wiryokusumo, I. Dan Usman, M, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 114

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 115-116



9	Sejarah Tatanegara	2	2	3	2
10	Pengetahuan Dagang	-	1	2	-
11	Seni Suara	1	1	1	1
12	Menggambar	1	1	1	2
13	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1
14	Pendidikan Jasmani	3	3	3	3
15	Budi Pekerti	-	-	-	-
16	<b>Agama</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Jumlah	37	37	37	37

Setelah itu, melalui SK menteri PP & K dengan Nomor: 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran. Keputusan penting dibuat oleh panitia ini. Keputusan tersebut adalah (1) menjadikan agama sebagai salah satu pelajaran yang diberikan di Sekolah Rakyat (SR) (2) kementerian Pendidikan menyediakan guru agama dan dibayar oleh pemerintah (3) mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk membentuk guru agama yang juga menguasai pengetahuan umum, dan (4) peningkatan mutu pesantren dan madrasah<sup>15</sup>.

Keputusan tersebut dikuatkan melalui penerbitan peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama Nomor: 1142/Bhg. A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946 yang resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 1947. Keputusan tersebut, secara umum, memutuskan bahwa Pendidikan Agama Islam diberikan pada siswa yang duduk di kelas IV sampai dengan kelas VI Sekolah Rakyat<sup>16</sup>.

Sebuah kebijakan tentang sebuah sistem tidak selamanya dapat diimplementasikan dengan baik. SKB dua menteri tersebut tidak dilaksanakan seutuhnya karena di beberapa daerah Pendidikan Agama Islam mulai diberikan pada kelas I SR. Oleh sebab itu, pada

<sup>15</sup> Minhadji, A. dan M. A. Mudzhar, Prof. K. H. Fathurrohman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum. Dalam Azra, A. dan Saiful A (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), hlm. 47

<sup>16</sup> Yunus, M, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hlm. 357

tahun 1947, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama dengan tugas mengatur pelaksanaan pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum<sup>17</sup>. Majelis tersebut akhirnya menghasilkan keputusan berupa penempatan Pendidikan Agama Islam pada setiap jenjang pendidikan; Kurikulum SR 1947, Kurikulum SMP 1947, dan Kurikulum SMA 1947. Kurikulum tersebut berlaku sejak 1947 sampai 1952.

Tabel 2

Mata Pelajaran berdasarkan Kurikulum 1947<sup>18</sup>

No	Mata Pelajaran Sekolah Rakyat	No	Mata Pelajaran SMP
1	Bahasa Indonesia	1	Bahasa Indonesia
2	Bahasa Daerah	2	Bahasa Daerah
3	Berhitung	3	Bahasa Inggris
4	Ilmu Alam	4	Berhitung
5	Ilmu Hayat	5	Aljabar
6	Ilmu Bumi	6	Ilmu Ukur
7	Sejarah	7	Ilmu Alam
8	Menggambar	8	Ilmu Kimia
9	Menulis	9	Ilmu Hayat
10	Seni Suara	10	Ilmu Bumi
11	Pekerjaan Tangan	11	Sejarah
12	Gerak Badan	12	Hitung Dagang
13	Kebersihan & Kesehatan	13	Pengetahuan Dagang
14	Pendidikan Budi Pekerti	14	Seni Suara

<sup>17</sup> Mustafa, H. A. dan Abdullah, A, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 124

<sup>18</sup> Mudyaharjo, R, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 385

<b>15</b>	<b>Pendidikan Agama</b>	15	Menggambar
		16	Pekerjaan Tangan/Kerja Wanita
		17	Pendidikan Jasmani
		18	Budi Pekerti
		<b>19</b>	<b>Agama</b>

- **Pendidikan Agama Islam Pascadekrit Soekarno**

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa konstelasi politik sangat memengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan. Iklim pendidikan nasional sempat mengalami kelimbangan konsep sejak Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Dalam UU No. 4/1950 atau UU No.12/1854 ditetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah “membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”<sup>19</sup>.

Dekrit Soekarno berdampak juga pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh MPRS. Pada tahun 1960, MPRS menerbitkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960. Berikut ini beberapa pasal yang menjelaskan arah kebijakan pendidikan saat itu:

- “Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur” – Bab II Pasal 5<sup>20</sup>
- “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agal setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing” – Bab II Pasal II ayat 1<sup>21</sup>
- “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (SD) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 386

<sup>20</sup> Assegaf, A. R, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 78

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 79

serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatan” – Bab II Pasal III<sup>22</sup>

Pada era ini, pemerintah menelurkan Kurikulum Sekolah Dasar 1964, SMP 1962, dan SMA (sebelumnya tahun 1952), diganti tahun 1961, kemudian 1964, yang diberlakukan pada tahun 1965. Pada tahun 1964, istilah Sekolah Rakyat resmi diganti menjadi Sekolah Dasar.

Dalam kurikulum SD tahun 1964, terdapat lima kelompok bidang studi atau *wardhana* (perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keprigelan, dan perkembangan jasmani)<sup>23</sup>. Dalam kurikulum ini, agama/budi pekerti dikelompokkan dalam *wardhana* perkembangan moral.

Dalam Kurikulum SMP tahun 1962, pemerintah membagi mata pelajaran menjadi 4 (empat) kelompok (dasar, cipta, rasa/karsa, dan krida)<sup>24</sup>. Pendidikan agama/budi pekerti dimasukkan ke dalam kelompok dasar. Sementara itu, dalam Kurikulum SMA tahun 1961, Pendidikan Agama dimasukkan dalam kelompok pelengkap (ada kelompok pokok, penting, dan pelengkap) bagi SMA bagian A (Bahasa/Sastra), bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), dan bagian C (Ekonomi).

#### - **Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003<sup>25</sup> sepertinya menjadi tonggak sejarah karena melalui undang-undang tersebut pendidikan agama dijadikan sebagai muatan wajib di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, Pendidikan Agama Islam menjadi mata kuliah wajib yang termasuk dalam rumpun Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama

---

<sup>22</sup> Mustafa, H. A. dan Abdullah, A, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 126

<sup>23</sup> Mudyaharjo, R, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 416-418

<sup>24</sup> Mudyaharjo, R, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 417-418

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional<sup>26</sup>. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa undang-undang ini dianggap sebagai keputusan yang lebih maju dari undang-undang sebelumnya karena setiap peserta didik dijamin untuk mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Melalui undang-undang tersebut, konsep institusionalisasi pendidikan agama (sebagai amanat UUD 1945 dan has asasi individu) telah terwujud. Hak atas pemerolehan pendidikan agama sama dengan hak atas pemerolehan pendidikan dan pengajaran pada umumnya. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Agama Islam yang dibuat sejak dahulu bukan merupakan campur tangan pemerintah dalam urusan agama, tetapi harus dilihat sebagai kebutuhan bangsa ini atas nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai agama tersebut dapat lebih efektif melalui lembaga pendidikan. Selain itu, nilai-nilai agama tersebut diharapkan dapat berwujud dalam aspek fisik dan psikis masyarakat, sehingga karakter sejati manusia Indonesia dapat terwujud.

## **2. Pendidikan Agama Islam dan Pembentukan Karakter**

Pendidikan, secara umum, merupakan sesuatu yang kompleks. Kompleksitas tersebut salah satunya berwujud pada adanya jarak antara pendidikan dan perbuatan. Proses pendidikan lebih terarah untuk mengukur kompetensi teoretis dan (seolah) menafikan kecerdasan psikis, karakter, dan perbuatan.

Pendidikan Agama Islam idealnya mampu menghasilkan muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas serta memiliki kekuatan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kata kunci utama dalam memaksimalkan posisi strategi Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan integralistik. Pendidikan Agama Islam dapat memaksimalkan pengamalan nilai-nilai agama yang sejatinya telah menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan Agama Islam harus diintegrasikan dengan akar budaya, pandangan hidup, dan sejarah masyarakat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari keterasingan yang justru dapat mematikan motivasi peserta didik dalam mempelajari agama Islam.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003<sup>27</sup>, tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37, ayat (1)

<sup>27</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, BAB III, Pasal 3, (Bandung: Fokus Media, 2003)

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Di sisi lain, dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010<sup>28</sup>, pendidikan agama (Islam) didefinisikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan dan peraturan menteri Agama nomor 16 tahun 2010 tersebut, Pendidikan Agama Islam dapat digunakan sebagai bagian dari sub-sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia yang prima secara fisik dan psikis. Pendidikan Agama Islam, dengan menimbang posisinya dalam dinamika pendidikan nasional, adalah sebuah usaha sadar untuk membimbing dan mengasuh aspek spiritualitas peserta didik sehingga konsep keagamaan menjadi pegangan hidup dalam mencapai keberhasilan individu atau kelompok (di dunia dan akhirat)<sup>29</sup>

Frasa “*learning by doing*” yang diperkenalkan oleh John Dewey selama ini dianggap menjadi konsep besar dalam pendidikan. Dewey, yang dalam aliran fungsionalisme dianggap sebagai pemikir bergaya pragmatis, menyatakan bahwa untuk mempelajari sesuatu diperlukan integrasi antara melihat, berpikir, dan melakukan<sup>30</sup>. Tidak boleh ada kesenjangan antara berpikir (*thinking*) dan melakukan (*doing*). Aktivitas berpikir tidak lengkap jika tidak diuji dengan pengalaman. Dalam sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia, konsep yang disampaikan oleh Dewey jelas mengingatkan pada konsep pendidikan ala K. H. Ahmad Dahlan. K. H. Ahmad Dahlan, dalam mengajarkan Islam, sangat menekankan pada pengamalan karena berkeyakinan bahwa agama tidak cukup sekadar dipahami dalam ranah tekstual tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk perbaikan kehidupan.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

<sup>29</sup> Marimba, A, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma’arif, 1999), hlm. 29

<sup>30</sup> Dewey, J, *Experience and Education*, (New York: Kappa Delta Pi, 1938), hlm. 31

Merujuk kembali kepada tujuan pendidikan untuk “mengembangkan kemampuan dan bentuk watak”, pendidikan sejatinya tidak hanya membekali siswa dengan asupan intelektual semata tetapi juga pembentukan karakter. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, hasil dari pendidikan agama pada peserta didik diharapkan dapat membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk menempatkan garis kehidupan (sosial, politik, dan ekonomi) yang sejalan dengan pedoman yang ditentukan oleh Allah SWT.

Banyak pakar pendidikan yang meyakini bahwa pendidikan harus memerhatikan tiga aspek, yaitu moral, mental, dan fisik. Aspek moral dianggap paling berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Pendidikan Agama Islam memiliki instrumen yang dapat membina kecerdasan moral peserta didik.

Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu *charassein* yang berarti ‘to engrave’ (mengukir, melukis, memahat, atau menggoreskan). Dalam KBBI, karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak<sup>31</sup>. Kata kunci yang menarik dari definisi tersebut kejiwaan, akhlak, dan ‘yang membedakan dari yang lain’. Kejiwaan dan akhlak adalah unsur kerohanian dalam diri setiap individu. Oleh sebab itu, pembentukan kejiwaan dan akhlak sejatinya dapat diwujudkan melalui pendekatan ritual dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, klausa ‘yang membedakan dari yang lain’ adalah ciri distingtif dari masing-masing individu. Dalam konteks ini, ciri distingtif perilaku manusia Indonesia biasanya dirumuskan melalui kerangka Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam terminologi ajaran Islam, ada tiga bagian konsep utama agama, yaitu *aqidah* (keyakinan), *syariah* (aturan-aturan umum tentang ibadah dan muamalah), dan *akhlak* (karakter). Tiga bagian tersebut tidak dapat dipisahkan. *Aqidah* adalah pondasi yang menopang terwujudnya *syariah* dan *akhlak*. *Syariah* merupakan bentuk bangunan yang hanya dapat terwujud apabila dilandasi oleh *aqidah* yang benar dan akan mengarah pada pencapaian *akhlak* yang seutuhnya<sup>32</sup>. Oleh sebab itu, pembentukan karakter dalam sistem pendidikan harus diawali dengan penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan.

Perlu dipahami bahwa *akhlak* (karakter) dalam Pendidikan Agama Islam tidak dapat disamakan dengan etika atau moral. Etika terbatas pada kesopanan dan kesantunan antarmanusia yang terbatas pada perilaku lahiriah. Karakter Islam adalah karakter yang

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Mengacu pada data dari KBBI Daring Edisi V, 2016

<sup>32</sup> Marzuki, Prinsip Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Dalam *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 468

disamping mengakui adanya nilai-nilai universal sebagai dasar bentuk karakter, juga mengakui nilai-nilai lokal dan temporal sebagai penjabaran atas nilai-nilai yang universal tersebut. Oleh sebab itu, karakter Islam dapat digunakan untuk menjabarkan etika secara umum, tetapi etika tidak dapat digunakan untuk menjabarkan karakter Islam.

Berbicara mengenai karakter Islam, maka rujukan utama yang digunakan adalah Al quran dan Hadis. Al quran bukan hasil renungan manusia, tetapi merupakan firman Allah SWT yang pasti benar dan pasti memberikan manfaat bagi manusia. Sementara itu, Hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Allah sendiri telah meletakkan dasar *akhlak* (karakter) dalam Al quran sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“*Sesungguhnya sudah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*” (QS. Al-Ahzab: 21)

Dalam Islam, ritus-ritus keagamaan sesungguhnya menyimpan nilai-nilai pendidikan karakter. Ibadah, dalam Al quran, dihubungkan sebagai wujud ketakwaan. Ketakwaan berarti terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Perintah Allah SWT pasti berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik dan larangan Allah SWT pasti berkaitan dengan perbuatan-perbuatan buruk. Bersandar pada keyakinan tersebut, orang yang bertakwa adalah orang berkarakter baik. Oleh sebab itu, mewujudkan karakter yang mulia harus berangkat dari pembentukan diri menuju ketakwaan.

Sebagai contoh, praktik keagamaan berupa ibadah haji, zakat, dan puasa sangat berkaitan dengan pendidikan karakter. Dalam melaksanakan ibadah haji, seorang muslim dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, cacian, dan (bahkan) berada pada situasi pertengkaran. Dalam pelaksanaan zakat, dimensi ibadah tidak hanya bertumpu pada pengeluaran harta, tetapi mencakup sikap saat berzakat, simpati dan empati sosial, dan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya milik pribadi. Dalam berpuasa, aspek-aspek karakter juga tidak luput dari pembahasan. Dikatakan bahwa “*tidak akan*



*diterima puasa seseorang jika tidak dapat menahan diri dari berkata tidak sopan apalagi berbohong).*

Contoh berikutnya dengan baik telah dipaparkan oleh Nasution. Nasution meyakini bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki kaitan yang erat dengan pendidikan akhlak (baca: karakter)<sup>33</sup>. Ibadah dalam Al Quran berhubungan dengan ketakwaan. Takwa didefinisikan sebagai melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan hal-hal baik dan menjauhi perbuatan buruk. Maka, orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia atau dalam terminologi kekinian disebut sebagai orang yang memiliki karakter baik. Hal-hal yang disebutkan tersebut hanya beberapa aspek karakter dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam. Dari sini, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai karakter yang mulia tidak pernah terlepas dari ajaran Islam.

Pendidikan Agama Islam, dengan berdasar pada trinitas iman, ilmu, dan amal, dapat menghasilkan peserta didik yang utuh. Iman (keyakinan) di dalam hati yang menjadi dasar awal, yang kemudian dilanjutkan dengan ilmu (pengetahuan) untuk mendukung keyakinan yang sudah dimiliki. Setelah iman dan ilmu dikuasai, maka seseorang akan dengan ikhlas melakukan amal (perbuatan) yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Perbuatan yang dilakukan atas dasar ketentuan Allah SWT tidak hanya akan bernilai baik di hadapan Allah SWT tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Akhirnya, melalui artikel ini, izinkan penulis untuk menyatakan bahwa Islam jauh lebih komprehensif merumuskan pentingnya amal (karakter) dalam proses pendidikan dibandingkan Lickona. Lickona menyatakan bahwa karakter memiliki tiga bagian yang disebut *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*<sup>34</sup>. Proses penanaman karakter diawali dengan mengetahui segala hal yang baik, kemudian diikuti keinginan untuk melakukan segala hal yang baik, dan akhirnya diikuti dengan melakukan segala hal yang baik.

Selain itu, perlu diyakini pula bahwa ritus-ritus keagamaan dalam Islam tidak semata untuk mendekatkan surga dan menjauhkan neraka, namun juga membina karakter yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial. Pendidikan Agama Islam memiliki peran yang strategis untuk mengajarkan peserta didik melakukan segala tindakan yang dianjurkan atau baik menurut hukum agama, hukum negara, dan hukum sosial. Pendidikan Agama tidak semata menyentuh aspek pengetahuan semata tetapi mampu menyentuh aspek pengamalan. Maka, Pendidikan Agama Islam jelas merupakan sub-sistem (bahkan

---

<sup>33</sup> Nasution, H, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 57

<sup>34</sup> Lickona, T, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 51

seharusnya *main-sistem*) pendidikan yang paling relevan untuk membentuk karakter bangsa yang seutuhnya.

### 3. Karakter ‘Barat’ dan Karakter ‘Timur’; Sebuah Integrasi

Ada nada sumbang terkait pendidikan karakter di Indonesia. Beberapa pihak sering menyebut bahwa pendidikan karakter terlalu diorientasikan ke ‘barat’. Maksudnya, referensi dan sumber nilai diarahkan pada dinamika internasional ala ‘barat’, padahal konsep nilai menurut ‘barat’ dan ‘timur’ sangat jauh berbeda. Pihak tersebut juga menganggap bahwa masuknya nilai-nilai ‘barat’ dapat menimbulkan kekacauan sistem nilai pada masyarakat ‘timur’.

Di sisi lain, dasar pembentukan karakter memang harus dibangun di atas kemampuan untuk membedakan nilai baik dan buruk. Oleh sebab itu, seseorang, seharusnya, memang tidak alergi pada perbedaan sistem nilai suatu budaya. Pendidikan harus mampu membekali siswa untuk mampu berpegang teguh pada satu sistem nilai yang diyakini (setelah menilai dua nilai yang ditemui).

Pada bagian ini, penulis meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara karakter ‘barat’ dan karakter ‘timur’. Pendidikan Agama Islam, sesungguhnya, mengandung nilai-nilai karakter yang universal yang tidak terikat pada batas-batas geografis. Sebagai sebuah simulasi, penulis akan menunjukkan bagaimana Pendidikan Agama Islam diintegrasikan dalam sistem pendidikan umum.

Character.org memberikan 11 (sebelas) prinsip dasar dalam pendidikan karakter<sup>35</sup>. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### 1. *Promotes core values.*

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, pihak sekolah dan orang tua harus menyetujui nilai-nilai karakter yang utama dan harus dipromosikan sebagai nilai utama dalam lembaga pendidikan mereka. Misalnya, sekolah berkomitmen dan mengomunikasikan kepada orang tua mengenai program-program keagamaan yang menjadi fokus lembaganya. Selain itu, sekolah juga harus mampu membuat deskripsi moral yang eksplisit terkait dengan pelaksanaan sebuah program keagamaan, sehingga parameter evaluasinya dapat terlihat.

---

<sup>35</sup> Character.org, *11 Principles of Effective Character Education*, (Washington: Character. org, 2014)

2. *Defines 'character' to include thinking, feeling, and doing.*

Sekolah, kemudian, mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk membantu para siswa dan seluruh elemen sekolah untuk menyadari makna dari nilai-nilai karakter utama yang telah ditetapkan. Selain itu, seluruh elemen sekolah (termasuk siswa) juga harus memahami alasan mengapa sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk. Misalnya, dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, sekolah bertanggungjawab untuk memberikan landasan keagamaan mengenai pelaksanaan sebuah kegiatan, sehingga pemahaman mengenai benar atau tidaknya sebuah tindakan berasal dari landasan hukum (agama) yang jelas. Idealnya, setelah pemahaman tersebut diperoleh, seluruh elemen sekolah dapat mengaplikasikannya dalam setiap tindakan (karena sudah meyakinkannya sebagai nilai inti keagamaan).

3. *Uses a comprehensive approach.*

Pendidikan karakter harus, secara sadar dan terbuka, dimasukkan dalam kehidupan sekolah pada semua level baik di dalam atau di luar kehidupan sekolah. Lebih umum, konsep keagamaan tidak terbatas pada penamaan mata pelajaran, tetapi menjadi nilai yang terintegrasi dalam kehidupan.

4. *Creates a caring community.*

Karakter harus dibangun oleh sekolah. Sekolah harus meningkatkan kemampuan seluruh elemen sekolah untuk memiliki simpati kepada seluruh pihak yang ada di sekolah. Konsep ini, menunjukkan adanya penerapan karakter sosial dalam kehidupan. Karakter yang baik, secara umum, tidak menjadi nilai positif bagi seorang individu, tetapi harus menjadi alat untuk berperilaku dalam kehidupan sosial.

5. *Provides students with opportunities for moral action.*

Sekolah harus menyediakan wahana yang representatif bagi seluruh elemen sekolah untuk mendemonstrasikan nilai-nilai karakter utama di dalam dan di luar kelas. Wahana di sini bukan berkaitan dengan ruangan, tetapi suasana. Misalnya, nilai utama berupa “mengucapkan salam” tidak terikat pada kewajiban murid kepada guru, tetapi juga ada kewajiban guru untuk membalas salam tersebut.

6. *Offers a meaningful and challenging academic curriculum.*

Pada bagian ini, butuh komitmen yang kuat dari pihak sekolah untuk membangun sebuah kurikulum yang menekankan integrasi pada seluruh mata pelajaran. Contohnya, di sebuah sekolah, ada kebijakan, dalam silabus dan RPP yang dibuat oleh guru, untuk memasukkan kutipan Al quran yang masuk dalam tema sebuah topik pelajaran. Ini merupakan usaha nyata yang menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam mampu menjadi dasar untuk memahami seluruh mata pelajaran.

7. *Fosters students' self-motivation.*

Pendekatan konsep Islam dalam kehidupan sekolah harus menekankan pada diskusi yang konstruktif, penjelasan yang komprehensif, dan konsekuensi yang rasional. Pendekatan ini bermakna bahwa konsep Islam tidak didekati secara material, tetapi sosial. Karakter bukan semata untuk dipelajari, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan.

8. *Engages staff as a learning community.*

Seluruh elemen sekolah adalah komunitas pelaksanaan karakter. Hal ini berarti seluruh elemen sekolah memiliki tanggung jawab yang serupa dalam melaksanakan karakter-karakter baik yang telah ditetapkan.

9. *Fosters shared leadership.*

Karakter dan kepemimpinan sangat berkaitan. Karakter sesungguhnya menumbuhkan pola kepemimpinan individu untuk berkomitmen melaksanakan hal-hal baik dalam kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus menyentuh aspek-aspek di luar formalitas kebenaran dan keburukan, tetapi berbagai landasan agama dan filosofis di baliknya sehingga pemahaman yang utuh dapat diperoleh.

10. *Engages families and community members as partners.*

Pembangunan komunikasi antara sekolah dengan orang tua harus ditumbuhkan. Pelaksanaan nilai-nilai mulia di sekolah harus dibarengi dengan kontrol pelaksanaan nilai di rumah (yang tentu saja dilakukan oleh orang tua). Oleh sebab itu, sekolah juga berkewajiban untuk mengomunikasikan dan meminta orang tua untuk secara konsisten dapat membuat lingkungan yang serupa dengan lingkungan dan aturan yang ditetapkan di sekolah.

11. *Assesses the culture and climate of the school.*

Karakter merupakan isu yang luas dan melibatkan banyak pihak. Sekolah dan orang tua tidak cukup menjadi pengontrol pelaksanaan nilai-nilai karakter dalam kehidupan. Sekolah harus merangkul lingkungan (pihak ketiga) yang dapat menjadi kolaborator dalam upaya evaluasi karakter siswa.

Dari kesebelas prinsip dasar tersebut, Pendidikan Agama Islam sesungguhnya dapat dimasukkan pada seluruh aspek tersebut (meskipun berkiblat pada konsep 'barat'). Hal ini menunjukkan bahwa konsep Islam bernilai universal, sehingga nilai-nilai karakter Islam dapat masuk pada semua jenis pemikiran. Contoh lainnya, Bialik menawarkan sebuah pendekatan holistik terkait pola pendidikan yang dibutuhkan pada abad ke-21. Bialik

mengenalkan istilah *metacognition*, *knowledge*, *skills*, dan *character*<sup>36</sup>. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah para pakar dari ‘barat’ baru menyadari pentingnya *character* pada dasawarsa terakhir. Islam sudah menaruh perhatian sangat tinggi pada *character* melalui terminologi *akhlak* jauh berabad-abad lalu.

Dalam *knowledge*, pengetahuan dibagi dalam *traditional* (terdiri atas matematika, sains, bahasa, dan lain-lain) dan *modern* (terdiri atas robotika, entrepreneurship, dan lain-lain). *Skills* berkaitan dengan kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. *Character* memasukkan sifat-sifat berupa *mindfulness*, *curiosity*, *courage*, *resilience*, *ethics*, dan *leadership*<sup>37</sup>.

Tidak perlu membahas keseluruhan konsep, Pendidikan Agama Islam dapat menjelaskan seluruh konsep *character* dalam teori ‘barat’ tersebut. Misalnya, jika *mindfulness* berkaitan dengan konsep keadaan untuk menyadari sesuatu yang patut dipertimbangkan, maka, bagi umat Islam, cukuplah Surat Qaf ayat 16 yang menjadi pegangan. Terjemahan bebas dari Surat Qaf ayat 16 adalah “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”. Melalui Pendidikan Agama Islam, seseorang ditanamkan karakter berupa kesadaran adanya kekuasaan Allah SWT untuk mengetahui segala hal yang ada dalam pikiran manusia. Karakter ini akan membawa pada pemahaman bahwa segala hal yang dipikirkan dan dilakukan oleh manusia tidak pernah lepas dari pengawasan dan pertanggungjawaban di depan Allah SWT.

Simulasi di atas, kurang-lebih, telah berusaha menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam sesungguhnya mampu menyentuh aspek-aspek universal dalam pendidikan karakter. Adapun argumentasi yang menyebutkan bahwa orientasi pendidikan karakter selama ini terlalu berorientasi ke ‘barat’, bagi penulis, adalah wujud inferioritas dan pengkerdilan terhadap universalitas ajaran Islam. Dibenturkan dengan konsep apapun, Pendidikan Agama Islam tidak akan kehilangan kewibawaannya karena Islam selalu mampu menjelaskan fenomena apapun dengan berlandaskan pada Al quran dan Hadis.

Selain itu, Pendidikan Agama Islam jelas menjadi sub-sistem pendidikan yang paling relevan untuk menanamkan karakter manusia Indonesia yang seutuhnya. Karakter tersebut didefinisikan sebagai manusia yang bertakwa, berorientasi pada kepentingan

---

<sup>36</sup> Bialik, M. dkk, *Character Education for the 21st Century: What Should Students Learn?*, (Boston: Center for Curriculum Redesign, 2015), hlm. 38

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 42

nasional, dan mempraktikkan (tidak hanya memahami) nilai-nilai baik pada setiap konteks kehidupan.

## **PENUTUP**

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam telah menemani perjalanan bangsa Indonesia (sebelum kolonialisme hingga sekarang). Namun, dinamika politik sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pendidikan formal. Di sisi lain, dalam berbagai sumber, Pendidikan Agama Islam memang menjadi sub-sistem utama dalam penerapan karakter bagi kemajuan bangsa. Nilai-nilai karakter yang ada dalam ajaran Islam berlaku universal, sehingga tidak terbatas pada dikotomi konsep ‘barat’ dan ‘timur’. Ajaran Islam mampu menembus batas-batas tersebut. Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Islam dapat membekali siswa dengan aspek-aspek pemahaman, perilaku, dan orientasi hidup yang dapat mengantarkan dirinya, lingkungannya, dan bangsanya menuju kemajuan yang hakiki; yaitu kemajuan yang diridai oleh Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Assegaf, A. R, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005).
- Bialik, M. dkk, *Character Education for the 21st Century: What Should Students Learn?*, (Boston: Center for Curriculum Redesign, 2015).
- Character.org, *11 Principles of Effective Character Education*, (Washington: Character.org, 2014).
- Dewey, J, *Experience and Education*, (New York: Kappa Delta Pi, 1938).
- Djumhur, I. Dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Penerbit CV. Ilmu, 1976)
- Freire, P, *Pedagogy of the Oppressed*, (New York: Continuum, 1970).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V, Mengacu pada data dari KBBI Daring Edisi V, 2016.
- Lickona, T, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1991).
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

- Marimba, A, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1999).
- Marzuki, Prinsip Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Dalam *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011).
- Minhadji, A. dan M. A. Mudzhar, Prof. K. H. Fathurrohman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum. Dalam Azra, A. dan Saiful A (Ed.), *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998).
- Mudyaharjo, R, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- Mustafa, H. A. dan Abdullah, A, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Nasution, H, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah
- Richards, J. C. dan Richard, S, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (London: Longman, 2002).
- Said, M. dan Juniar, A, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Penerbit Jemmars, 1987).
- Steenbrink, K.A, *Pesantren Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, BAB III, Pasal 3, (Bandung: Fokus Media, 2003)
- Wiriyokusumo, I. Dan Usman, M, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988),, hlm. 115-116
- Yunus, M, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara kerjasama dengan Ditjen Bimbingan Islam Depag RI, 2000).